

ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK DALAM UPAYA MEMECAHKAN MASALAH PENGANGGURAN DI KABUPATEN DELISERDANG

***Ferry Setiawan¹⁾, Nurul Hikmah²⁾**

1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia

2) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia

Abstrak

Pengangguran merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Deliserdang, memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik yang relevan dalam mengatasi masalah pengangguran serta menyusun rekomendasi strategis untuk para pembuat kebijakan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen kebijakan, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi intervensi berbasis pelatihan kerja, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta investasi sektor industri dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi tingkat pengangguran.

Kata Kunci: Kebijakan Publik; Pengangguran; Pembangunan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Kabupaten Deliserdang, sebagai salah satu wilayah strategis di Sumatera Utara, menghadapi tingkat pengangguran yang signifikan. Pengangguran tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, seperti penurunan pendapatan rumah tangga, tetapi juga menciptakan masalah sosial, termasuk peningkatan angka kriminalitas. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kebijakan yang telah ada serta menyusun rekomendasi baru yang berbasis data untuk membantu para pembuat kebijakan dalam menangani masalah ini (Fischer, 2003).

Pengangguran merupakan salah satu isu utama yang menjadi perhatian global, nasional, dan lokal. Di Kabupaten Deliserdang, fenomena ini tidak hanya menjadi tantangan ekonomi tetapi juga sosial. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan tahunan pemerintah daerah, tingkat pengangguran terbuka di

Deliserdang mengalami tren fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir, yang sebagian besar dipengaruhi oleh dinamika ekonomi lokal, global, serta dampak pandemi COVID-19. Sektor ekonomi utama di Deliserdang meliputi pertanian, perdagangan, dan jasa. Namun, pergeseran kebutuhan pasar kerja akibat perkembangan teknologi dan industrialisasi telah menciptakan kesenjangan keterampilan tenaga kerja. Sebagai contoh, banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan teknis tinggi, sementara sebagian besar penduduk memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas. Akibatnya, peluang kerja yang tersedia seringkali tidak dapat diakses oleh pencari kerja lokal (Amara & Ayadi, 2013).

Di sisi lain, upaya pemerintah daerah dalam mengurangi pengangguran telah diwujudkan melalui berbagai program, seperti pelatihan kerja, pemberian bantuan usaha bagi UMKM, serta insentif investasi untuk sektor industri. Namun, efektivitas program-program ini masih menjadi tanda tanya. Masalah koordinasi antar lembaga, kurangnya alokasi anggaran yang memadai, dan kurangnya kesesuaian antara program yang dirancang dengan kebutuhan masyarakat menjadi penghambat utama keberhasilan program tersebut. Secara sosial, pengangguran yang tinggi di Kabupaten Deliserdang telah memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan bahkan kriminalitas. Selain itu, hal ini juga menimbulkan tekanan psikologis bagi individu dan keluarga yang terdampak. Misalnya, generasi muda yang tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pendidikan mereka cenderung merasa frustrasi, yang pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas dan daya saing wilayah secara keseluruhan (Pasolong, 2010).

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan analisis yang mendalam terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Dengan memahami kelemahan, tantangan, dan potensi dari kebijakan yang ada, para pembuat kebijakan dapat menyusun langkah-langkah yang lebih efektif dan berkelanjutan (Budi Winarno, 2008). Dalam konteks ini, pendekatan berbasis data dan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Pendekatan ini tidak hanya memastikan bahwa kebijakan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan lokal, tetapi juga memberikan rasa kepemilikan kepada masyarakat sehingga mereka lebih terlibat

dalam proses pelaksanaan. Selain itu, penting untuk belajar dari praktik terbaik di wilayah lain yang telah berhasil mengatasi pengangguran (Dye, 2017). Misalnya, beberapa daerah di Indonesia telah berhasil memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan platform pencocokan kerja yang lebih efektif. Langkah-langkah seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi Kabupaten Deliserdang untuk meningkatkan strategi mereka dalam mengatasi pengangguran.

Dalam tulisan ini, latar belakang pengangguran di Kabupaten Deliserdang menjadi fokus utama untuk memahami konteks permasalahan yang ada. Dengan mengeksplorasi berbagai aspek, mulai dari kondisi ekonomi, tantangan sosial, hingga kebijakan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis dan strategis bagi para pembuat kebijakan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Deliserdang secara keseluruhan. Berdasarkan masalah di atas maka penulis ingin mengetahui Bagaimana kebijakan yang saat ini diterapkan di Kabupaten Deliserdang dalam mengatasi pengangguran.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa Analisis dokumen kebijakan dalam Mengkaji kebijakan lokal terkait ketenagakerjaan dan pengembangan ekonomi. Wawancara mendalam yang Melibatkan pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku usaha di Kabupaten Deliserdang dan Studi literatur dengan Menggunakan referensi dari penelitian sebelumnya yang relevan (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan yang Saat Ini Diterapkan di Kabupaten Deliserdang telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi pengangguran, yang mencakup pelatihan kerja, pengembangan UMKM, dan menarik investasi. Namun, keberhasilan kebijakan ini memerlukan evaluasi mendalam untuk menilai sejauh mana mereka efektif dalam menghadapi tantangan pengangguran lokal. Program pelatihan kerja merupakan salah satu

inisiatif utama yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deliserdang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal agar dapat bersaing di pasar kerja. Pelatihan yang ditawarkan mencakup berbagai bidang seperti keterampilan teknis (misalnya mekanik, pengoperasian alat berat), keterampilan layanan (seperti tata boga dan hospitality), serta pelatihan digital (seperti desain grafis dan pengelolaan media sosial) (Howlett & Ramesh, 2003).

Namun, cakupan program pelatihan ini masih terbatas. Berdasarkan data yang diperoleh, hanya sebagian kecil dari angkatan kerja yang dapat mengikuti pelatihan setiap tahunnya. Selain itu, terdapat kesenjangan antara jenis pelatihan yang diberikan dengan kebutuhan pasar kerja. Misalnya, pelatihan tata boga masih menjadi dominan, sementara sektor industri lokal justru membutuhkan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan mesin CNC atau memiliki keahlian di bidang teknologi informasi. Pada Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi prioritas lain dalam kebijakan pengurangan pengangguran. Pemerintah daerah memberikan bantuan modal usaha serta pelatihan kewirausahaan untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Sebagai contoh, program kredit usaha rakyat (KUR) yang disubsidi pemerintah telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat pengembangan UMKM. Salah satunya adalah akses pasar yang masih terbatas. Banyak pelaku UMKM mengeluhkan sulitnya memasarkan produk mereka, baik di pasar lokal maupun regional. Selain itu, rendahnya tingkat literasi keuangan dan manajemen bisnis di kalangan pelaku UMKM menyebabkan banyak usaha yang tidak dapat bertahan lama. Pada sektor Daya Tarik Investasi pemerintah kabupaten Deliserdang telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, Kabupaten Deliserdang juga aktif menarik investasi dari sektor swasta. Insentif seperti pembebasan pajak dan kemudahan perizinan diberikan kepada perusahaan yang bersedia berinvestasi di wilayah ini. Sebagai hasilnya, beberapa perusahaan besar di sektor manufaktur dan logistik telah mendirikan fasilitas mereka di Deliserdang.

Dampak investasi ini terhadap pengurangan pengangguran masih terbatas. Sebagian besar pekerjaan yang tersedia merupakan pekerjaan dengan keterampilan rendah dan bersifat kontrak sementara. Hal ini berarti bahwa dampak jangka panjang dari

investasi terhadap stabilitas tenaga kerja lokal belum maksimal. Selain itu, ada keluhan dari masyarakat lokal bahwa banyak perusahaan lebih memilih untuk merekrut tenaga kerja dari luar daerah karena keterampilan tenaga kerja lokal dianggap tidak memadai. Salah satu kelompok yang menjadi fokus utama kebijakan pengangguran adalah pemuda. Program-program seperti "Magang Kerja" dan "Pemuda Mandiri" dirancang untuk memberikan kesempatan kepada pemuda untuk memperoleh pengalaman kerja dan membangun usaha sendiri. Program ini mendapat sambutan positif dari peserta, namun jumlah pemuda yang dapat mengikuti program ini masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah pemuda yang menganggur.

Disisi lain ternyata hal tersebut menghadapi Kendala Implementasi Kebijakan, Keterbatasan Anggaran Anggaran yang dialokasikan untuk program pengurangan pengangguran seringkali tidak mencukupi untuk mencakup seluruh wilayah Kabupaten Deliserdang. Hal ini menyebabkan banyak desa yang tidak mendapatkan manfaat langsung dari program yang dijalankan. Kesenjangan Keterampilan Tenaga Kerja Salah satu kendala utama dalam mengurangi pengangguran adalah kesenjangan keterampilan antara pencari kerja dan kebutuhan pasar. Sebagian besar tenaga kerja lokal hanya memiliki pendidikan setingkat SMA tanpa pelatihan tambahan, sehingga sulit bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga Kebijakan pengurangan pengangguran sering kali tidak terkoordinasi dengan baik antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Sebagai contoh, program pelatihan kerja seringkali tidak didasarkan pada kebutuhan nyata perusahaan yang ada di Kabupaten Deliserdang. Serta, Dampak Pandemi COVID-19 Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak besar pada ekonomi lokal, menyebabkan banyak perusahaan yang terpaksa melakukan PHK atau menghentikan operasi mereka. Hal ini memperburuk tingkat pengangguran yang sudah tinggi di wilayah tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas maka, penulis memberikan Rekomendasi Strategis antarlain:

1. Optimalisasi Pelatihan Kerja, dimana Pemerintah daerah perlu menjalin kerja sama dengan sektor swasta untuk mengembangkan program pelatihan berbasis kebutuhan pasar. Misalnya, perusahaan di sektor teknologi dapat membantu menyelenggarakan pelatihan teknis bagi pencari kerja lokal serta Pelatihan kerja

harus lebih inklusif dengan melibatkan kelompok rentan seperti pemuda putus sekolah, perempuan kepala keluarga, dan penyandang disabilitas.

2. Pengembangan UMKM yang Berkelanjutan, dimana Fasilitas kredit dengan bunga rendah harus ditingkatkan untuk mendukung pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka dan Pemerintah daerah dapat memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan produk-produk lokal ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar internasional.
3. Peningkatan Daya Tarik Investasi, perlu adanya Regulasi yang lebih sederhana dan insentif fiskal yang kompetitif dapat menarik lebih banyak investor ke Kabupaten Deliserdang. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa investasi yang masuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal, seperti pelatihan kerja bagi tenaga kerja lokal sebelum dipekerjakan. Serta, Pemerintah daerah juga dapat membentuk zona ekonomi khusus untuk menarik investasi di sektor-sektor strategis seperti manufaktur teknologi tinggi atau agroindustri.
4. Pendekatan Inovatif untuk Penciptaan Lapangan Kerja dimana, Pengembangan platform digital untuk pencocokan kerja (job matching) dapat membantu mempertemukan pencari kerja dengan peluang kerja yang sesuai dengan keterampilan mereka. Disisilain Pemanfaatan big data untuk menganalisis tren pasar kerja dan kebutuhan industri di masa depan dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan pentingnya kebijakan terhadap pembangunan ekonomi wilayah, di antaranya penelitian (Yang et al., 2024); (He & Huang, 2024)(Craig et al., 2023)(Fazio & Lavecchia, 2013) menunjukkan terdapat hubungan antara kebijakan dan pembangunan ekonomi wilayah dan konvergensi wilayah. Sedangkan penelitian (Doh & McNeely, 2012) menunjukkan pentingnya bagi arah kebijakan di masa depan. Sedangkan penelitian (Infante, 2017) Oleh karena itu, para pembuat kebijakan perlu memperhitungkan berbagai skala sosial ketika merancang dan melaksanakan program dan intervensi pembangunan, tidak hanya berfokus pada individu atau rumah tangga, tetapi juga pada seluruh masyarakat. Penelitian (Putra et al., 2017) menunjukkan bahwa konsep kebijakan yang partisipatoris dalam pembangunan

peternakan berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan rumah tangga yang berbasis pada persepsi diri tentang kesehatan keluarga, penerimaan, dan pendapatan selain untuk faktor produksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka Kesimpulan Penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran di Kabupaten Deliserdang dapat dikurangi melalui kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data. Rekomendasi yang disusun memberikan arahan konkret untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan pengurangan pengangguran. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi tantangan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amara, M., & Ayadi, M. (2013). The local geographies of welfare in Tunisia: Does neighbourhood matter?*. *International Journal of Social Welfare*, 22(1), 90–103. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2397.2011.00863.x>
- Budi Winarno. (2008). *Kebijakan Publik*. Gramedia.
- Craig, A., Hutton, C., Lewis, L. A., Musa, F. B., & Sheffield, J. (2023). Linking household access to food and social capital typologies in Phalombe District, Malawi. *Sustainability Science*, 18(4), 1721–1737. <https://doi.org/10.1007/s11625-023-01329-w>
- Doh, S., & McNeely, C. L. (2012). A multi-dimensional perspective on social capital and economic development: An exploratory analysis. *Annals of Regional Science*, 49(3), 821–843. <https://doi.org/10.1007/s00168-011-0449-1>
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy (15th ed.)*. Pearson Education.
- Fazio, G., & Lavecchia, L. (2013). Social Capital Formation across Space: Proximity and Trust in European Regions. *International Regional Science Review*, 36(3), 296–321. <https://doi.org/10.1177/0160017613484928>
- Fischer, F. (2003). *Reframing Public Policy: Discursive Politics and Deliberative Practices*. Oxford University Press.
- He, L., & Huang, J. (2024). Social capital, government guidance and contract choice in agricultural land transfer. *PLoS ONE*, 19(5 May), 1–20. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0303392>

- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying Public Policy. Policy Cycles and Policy Subsystems*. (2nd edn.). Oxford University Press, Oxford.
- Infante, F. (2017). The role of social capital and labour exchange in the soils of Mediterranean Chile. *Rural Society*, 26(2), 107–124. <https://doi.org/10.1080/10371656.2017.1330837>
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Putra, R. A. R. S., Ariyadi, B., Kurniawati, N., & Haryadi, F. T. (2017). Pengaruh Modal Sosial Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Peternak: Studi Kasus Pada Kelompok Peternak Ayam Kampung Ngudi Mulyo, Gunungkidul. *Buletin Peternakan*, 41(3), 349. <https://doi.org/10.21059/buletinpeternak.v41i3.18135>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Yang, Y., Huang, Y., Huang, J., & Nie, F. (2024). The role of social capital in the impact of multiple shocks on households' coping strategies in underdeveloped rural areas. *Scientific Reports*, 14(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-65206-x>